

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Negara Jepang terletak di lepas pantai timur Asia yang membentang dari utara ke selatan sepanjang 3.800 km. Kepulauan Jepang terdiri atas 4 pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, serta Kyushu. Sekitar 70% daratan Jepang tertutup oleh pegunungan yang terdiri dari 67 buah gunung berapi yang masih aktif. Oleh karena itu, negara Jepang merupakan negara yang sering dilanda gempa.<sup>1</sup> Ditinjau dari posisi dan letaknya, Jepang terpisah dari daratan Asia. Jepang berada di sebelah timur benua Asia dan di batasi oleh Laut Okhotsk di Utara, laut Jepang di barat, dibagian timur di batasi oleh lautan Teduh dan bagian selatan di batasi oleh laut Cina selatan. Jepang dengan luas wilayah daratan adalah sekitar 377.619 km<sup>2</sup>, merupakan sebuah negara yang miskin akan sumber daya alam.<sup>2</sup> Dengan kondisi miskin akan sumber daya alam itu, maka masyarakat Jepang berupaya untuk memajukan kehidupan perekonomiannya dengan jalan menggalakkan sektor industri, perdagangan serta berbagai unsur lain dari struktur ekonomi modern. Perekonomian Jepang saat ini berada pada taraf industri maju dengan diimbangi oleh lajunya arus informasi dan jaringan transportasi yang berkembang luas. Salah satu ciri khas dari perekonomian Jepang adalah adanya sumbangan utama sektor produksi dan jasa. Ciri khas lainnya adalah relatif

---

<sup>1</sup> M.A. Desky, *melayani wisatawan Jepang*, adicita karya nusa, Yogyakarta, 1999, hal 5

<sup>2</sup> Syahbuddin Mangandaralam, *Jepang Negara Matahari Terbit*, PT. Remaja Rosda karya, Bandung, 1993, ha2

pentingnya perdagangan internasional bagi ekonomi Jepang.<sup>3</sup> Keberadaan Jepang sebagai negara industri maju menjadikan Jepang sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang kuat dan banyak memberikan bantuan bagi negara berkembang dan khususnya negara dunia ketiga. Pasca PD II pertumbuhan ekonomi Jepang berjalan pesat sehingga menjadikan Jepang sebagai negara donor terbesar di dunia.<sup>4</sup>

Hal ini sangat menarik untuk di kaji yaitu mengenai pengawasan yang dilakukan Jepang dalam hal pemberian dana bantuan kepada Indonesia khususnya Aceh dan apakah ada indikasi penyelewengan yang dilakukan Indonesia terhadap pemberian dana bantuan tersebut, serta kepentingan Jepang dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Maka penulis mengambil judul :

**“PENGAWASAN JEPANG TERHADAP PROGRAM OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) KEPADA ACEH”**

**B. TUJUAN PENELITIAN**

Penulis skripsi bertujuan ingin mengetahui kenapa Jepang melakukan pengawasan terhadap dana bantuan ODA yang diberikan kepada Aceh.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sebagai alat atau sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang didapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.

---

<sup>3</sup> Royal Wakaba, *Jepang Dewasa Ini*, International Society For Educational Information Inc, Shinjuku-ku Tokyo Jepang, 1989, hal 52

<sup>4</sup> Siti Daulah Khoiriati, Bantuan Pembangunan Resmi dan Politik Luar Negeri Jepang di Asia Pasifik, Prospektif, volume 7. No. 1, 1995, hal 45

### **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejarah bantuan Jepang pada Indonesia sudah cukup panjang. Sejak tahun 1991 Jepang merupakan negara donor terbesar diantara negara-negara yang tergabung dalam *Development Assistance Committee (DAC)*, *Organization for Economic Cooperation & Development (OECD)*. Bagi Jepang, bantuan pembangunan resmi (*ODA / Official Development Assistance*), sampai saat ini tetap merupakan prioritas sentral dan pilar utama kebijakan luar negerinya. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan Jepang di hampir semua lembaga donor dunia dan selalu menjadi penyumbang yang terbesar. Sebagai contoh, total bantuan Jepang terhadap Indonesia sampai tahun 1997, misalnya, selalu terbesar diantara negara-negara donor lainnya, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak. Menurut *Director of Southeast Asia Division Regional Department, Japan International Cooperation Agency ( JICA )*, Teruyoshi Kumashiro, konsistensi sikap Jepang tersebut dikarenakan Indonesia dinilai sangat penting di mata Jepang.

Pada saat ini kondisi di Indonesia sedang mengalami krisis, terutama setelah terjadi banyak bencana alam yang melanda Indonesia seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dll. Tsunami yang melanda beberapa Negara di kawasan Asia adalah sebuah tragedi kemanusiaan terbesar yang terjadi pada tahun 2004. Indonesia adalah salah satu Negara dengan korban jiwa terbanyak. Pasca bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami membawa pada kondisi yang memprihatinkan dengan melihat kerusakan fisik yang sangat parah di propinsi NAD dan Sumatera Utara. Sejalan dengan kondisi terhentinya seluruh aktivitas ekonomi di propinsi NAD dan Sumut yang dilanda bencana, masalah-

masalah barupun timbul dan semakin menjadi isu nasional yang semakin menonjol.

Karena bencana tersebut keadaan ekonomi di Indonesia semakin terpuruk, khususnya di propinsi NAD. Akibat keadaan tersebut akan muncul masalah-masalah besar yang tidak dapat di hindari. Akibat dari bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut antara lain adalah, tingginya jumlah pengangguran akibat hilangnya lapangan pekerjaan yang disapu oleh gelombang tsunami, pemukiman penduduk yang tidak layak, pendidikan anak-anak yang terancam, serta banyak lagi permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut. Indonesia harus membangun kembali daerah yang hancur karena bencana alam dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan pinjaman Indonesia terhadap IMF dan Bank Dunia masih sangat besar, hal ini juga yang memaksa Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara maju, salah satunya adalah negara Jepang. Sebagai salah satu negara kaya, Jepang berperan vital terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa dan gelombang tsunami. Ini dapat dilihat dari bantuan, baik materi maupun non materi yang diberikan oleh pemerintah Jepang.

Tabel 1.1

Bantuan Jepang kepada Aceh Pasca Gempa bumi dan Tsunami meliputi berbagai bentuk

No	Bentuk Bantuan	Keterangan
1	Bantuan Darurat	Sebesar US\$ 390.000 berupa : tenda, selimut, genset
2	Bantuan Hibah Bilateral	1. US\$ 1,5 juta, untuk pengadaan makanan darurat dan peralatan medis. 2. US\$ 146 juta, untuk barang bantuan darurat dan reonstruksi di Aceh.
3	Pengiriman Tim Medis Darurat Jepang	
4	Pengiriman Pasukan Beladiri Jepang	Terdiri dari personil AL, AD, AU dan Join Staff Office, untuk mendukung operasi bantuan dalam bidang pengangkutan barang melalui udara, serta melaksanakan pencegahan epidemic di Indonesia.
5	Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta Jepang	pengiriman 1540 unit kantong mayat oleh JICA, dan bantuan lainnya yang bersifat barang dan jasa. <sup>5</sup>
6	Bantuan melalui LSM Jepang “AMDA International” (Perawatan Trauma dan Kesehatan Fisik)	a. Dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pembangunan kembali pasca tsunami dan konsolidasi perdamaian di Aceh, pemerintah Jepang melalui “bantuan Hibah kepada LSM Jepang” telah memutuskan untuk memberikan bantuan hibah sebesar US\$ 246,014 (sekitar Rp.2.2 miliar). b. Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha pembinaan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik di kalangan anak-anak, baik di daerah-daerah yang pernah dilanda tsunami maupun di daerah-daerah yang dulu menjadi korban konflik. Kedua proyek tersebut adalah sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Perawatan Trauma bagi Anak-anak Korban Tsunami. Nilai bantuan : US\$ 82.170</li> <li>• Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk</li> </ul>

<sup>5</sup> [www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=bankdata&file=view&coid=210306&lang](http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=bankdata&file=view&coid=210306&lang)

		<p>meringankan trauma akibat tsunami pada anak-anak yang sampai sekarang masih tinggal di barak-barak pengungsian di Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu melalui berbagai kegiatan kreatif dan membaca di sejumlah perpustakaan di bawah pimpinan para pemuda dalam komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Rehabilitasi Komunitas melalui Perawatan Kesehatan Mental dan Fisik. Nilai bantuan : US\$ 163.844</li> </ul>
--	--	--

Tabel 1.2

Bantuan Pemerintah Jepang kepada Aceh

No	Bantuan pemerintah Jepang	keterangan
1	US\$ 300 juta, US\$ 160 juta, US\$ 140 juta	Bantuan bilateral untuk rehabilitasi sebagai respons terhadap terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh pada tanggal 24 Desember 2004
2	US\$ 12 juta , US\$ 8,6 juta,	Bantuan untuk pembangunan perdamaian di Aceh. Jepang memberikan bantuan pendukung bagi para individu, misalnya program reintegrasi mantan pejuang GAM dan tahanan politik. Bantuan untuk pembangunan daerah-daerah yang dulu menjadi korban konflik, dan tata pemerintahan menuju konsolidasi Perdamaian. <sup>6</sup>

Jepang merupakan salah satu negara yang maju perekonomiannya di Dunia dan sangat di dukung oleh perluasan industri yang menjadikan sektor ekonomi tumbuh dengan cepat. Keinginan pemerintah Jepang dalam membantu pemerintah Indonesia memang hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi, dan keinginan Jepang itu terucap dari perkataan Dubes Jepang untuk Indonesia,

<sup>6</sup> [http://www.id.emb-japan.go.jp/news07\\_09.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/news07_09.html)/17 Maret 2007

Yutaka Imura yang mengatakan bahwa pemerintah Jepang bersiap akan menambah bantuan hibahnya ke Indonesia. Bantuan untuk Indonesia dinilai penting karena kedekatan ekonominya dengan Jepang dan kepentingan geografisnya. Hal ini berarti bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang menguntungkan bagi Jepang.

Dalam setiap pemberian dana bantuan pemerintah Jepang selalu melakukan pengawasan yang di bantu oleh kantor JICA yang ada di Indonesia, pemerintah Jepang menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak tsunami di Aceh dan menetapkan target-target dengan limit waktu tertentu serta melaporkan secara periodik sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan. Selain Jepang, pemerintah Indonesia juga terlibat dalam pengawasan dana bantuan, oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menyelidiki indikasi korupsi dalam penyaluran bantuan untuk para korban tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Diharapkan KPK dan BPK maksimal dalam mengawasi, meneliti dan membongkar kasus-kasus yang terdapat indikasi korupsinya. Hal ini dilakukan pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia (KPK dan BPK) untuk mengetahui keberhasilan bantuan, sekaligus dapat mengetahui apakah bantuan tersebut terjadi penyalahgunaan atau tidak, karena aliran dana bantuan Pemerintah Jepang ke Indonesia melalui program ODA ini sangatlah besar.

## **D. POKOK PERMASALAHAN**

Dari latar belakang permasalahan diatas, pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam skripsi ini adalah :

“ Mengapa Jepang melibatkan KPK dalam melakukan pengawasan terhadap program bantuan *Official Development Assistance (ODA)* yang diberikan kepada Aceh pasca gempa bumi dan tsunami ? ”

## **E. KERANGKA DASAR TEORETIK**

### **1. Konsep Legitimasi**

Kerangka pemikiran yang digunakan berdasar pada konsep keabsahan yang disampaikan oleh Prof. Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, beliau menuliskan:

“ Pada kebanyakan Negara-negara baru dimana kesetiaan lokal (*primordial attachment*) tampak masih kuat dibandingkan dengan kesetiaan Nasional, serta banyak suku, dan aliran, maka soal keabsahan (*legitimasi*) perlu digalang. Keabsahan adalah konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa diterima baik oleh masyarakat oleh karena sesuai dengan azaz-azaz dan prosedur yang berlaku dan di anggap wajar. ”<sup>7</sup>

Legitimasi dalam wikipedia Indonesia diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin

---

<sup>7</sup> Meriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2001, hal. 37-38

dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan oleh keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin.<sup>8</sup>

Legitimasi dapat berarti sebagai wujud hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Legitimasi berkaitan apakah rakyat menerima atau tidak hak moral pemimpin untuk membuat keputusan-keputusan atas mereka, dan hanya rakyat yang dapat memberikan legitimasi.<sup>9</sup> Jadi legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik.<sup>10</sup> Menurut Andrain, dalam sistem politik ada empat obyek legitimasi. Keempat obyek tersebut meliputi struktur politik, keyakinan-keyakinan, kekuasaan oleh orang-orang tertentu serta kebijakan.<sup>11</sup> Obyek-obyek tersebut memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan berfungsi.

Menurut Ferrero, agar pemerintahan menjadi sah maka dibutuhkan waktu agar rakyat terbiasa dengan prinsip legitimasi mereka. Ada dua sarana untuk itu :

- Pertama, simbol-simbol ekspresif, yakni penggunaan simbol-simbol itu dapat berupa kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai masyarakatnya.
- Kedua, manfaat-manfaat kongkret, yakni dengan menjanjikan tersedianya layanan yang kongkret seperti kesejahteraan, perdamaian, ketertiban, internal, keamanan eksternal, pendidikan, kesehatan. Dalam hal ini, individu melihat sistem itu sebagai sistem yang sah karena sistem tersebut

---

<sup>8</sup> Legitimasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/legitimasi>, 2 januari 2008

<sup>9</sup> Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal 203

<sup>10</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1992, hal 85

<sup>11</sup> Andrain, *Op. Cit.*, hal 204

ikut memenuhi kebutuhan mereka akan pemerintahan yang efektif, dan yang paling utama kebutuhan akan pekerjaan, kekayaan dan status.<sup>12</sup>

Berdasar atas pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima prinsip legitimasi yaitu :

- Pertama, legitimasi tradisional, yang mana rakyat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin karena hal tersebut dibenarkan secara moral dan wajar. Dalam usaha menjustifikasi kebijakan termasuk kekuasaan personal mereka, para pemimpin ada kalanya juga menyatakan bahwa mereka mengikuti keinginan-keinginan pendahulu mereka.
- Kedua, legitimasi ideologis, yakni masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin karena dia dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi.
- Ketiga, legitimasi personal, yakni pengakuan dan dukungan kepada pemimpinnya karena dia memiliki kualitas pribadi berupa kharisma maupun pembawaan pribadinya.
- Keempat, legitimasi prosedural, yang mana masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpinnya karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Kelima, legitimasi instrumental, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan karena pemimpin menjanjikan ataupun menjamin manfaat-manfaat kongkret bagi masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ferrero Guglielmo, “ *The Principles of Power* ”, dalam Ibid, hal 206-207

Keabsahan / legitimasi merupakan faktor utama yang mendukung pembangunan suatu Negara. Kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahnya akan melahirkan nasionalisme pembangunan dan kepatuhan rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Kepatuhan rakyat terhadap pemerintah akan menciptakan suasana kondusif dalam suatu Negara yang nantinya akan memperlancar proses pembangunan secara menyeluruh.

Pemerintah Jepang mendapatkan legitimasi dari rakyat Jepang. Hal ini dapat dilihat dari dukungan rakyat Jepang yang mau mengakui, menerima dan melaksanakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat. Agar rakyat menerima legitimasi tersebut, dilakukan dengan dua cara yakni simbol-simbol ekspresif dan manfaat-manfaat kongkret.

Pemerintah Jepang mendapat legitimasi melalui sarana legitimasi instrumental, rakyat Jepang memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah Jepang karena pemerintah menjanjikan ataupun menjamin manfaat-manfaat kongkret bagi masyarakat. Kebijakan Jepang melakukan pengawasan terhadap dana bantuan yang diberikan kepada Indonesia merupakan salah satu kebijakan pemerintah Jepang dalam rangka mendapatkan legitimasi dari rakyatnya, kebijakan tersebut dilakukan oleh Jepang yang bekerjasama dengan Organisasi JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

---

<sup>13</sup> Andrain, *op. cit.*, hal. 207-211

## 2. Konsep Kerjasama

Untuk membahas mengenai keterlibatan KPK dalam pengawasan program ODA dapat digunakan konsep kerjasama. K.J. Holsti menyatakan bahwa sebagai transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.<sup>14</sup>

Istilah kerjasama (collaboration), dapat menimbulkan satu citra akan organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitas pembangunannya.<sup>15</sup>

Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia, khususnya Aceh adalah kerjasama ekonomi. Bantuan luar negeri berupa penerimaan uang, barang atau nasihat teknis dari sebuah negara donor kepada penerima merupakan kebijakan yang telah lama digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.<sup>16</sup> Bantuan itu sendiri terdiri dari :

---

<sup>14</sup> K.J. Holsti, “*Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*”, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.209

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> K.J. Holsti, “*Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*”, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.245

- a. Bantuan militer, yang merupakan tipe yang tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk menunjang persekutuan.
- b. Bantuan teknis, yang paling murah dari semua tipe program, dirancang untuk lebih menyebarkan pengetahuan dan keahlian, bukan pangan ataupun uang. Personel dengan keahlian khusus dari negara-negara industri pergi ke luar negeri untuk memberi nasihat mengenai aneka proyek.
- c. Bantuan berupa program hibah (pemberian) dan impor komoditi. Sampai tahun 1950-an yang lalu, metode pengalihan modal dan barang yang lebih disukai adalah menyumbangkan pemberian atau hibah ikhlas yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali secara ekonomi.
- d. Pinjaman pembangunan. Sesungguhnya, bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman, sama sekali bukan bantuan. Pinjaman menggambarkan pengalihan dana jangka pendek, tetapi karena para penerima membayar kembali pokok pinjaman atau bunga, maka pengalihan itu hanya bersifat sementara.<sup>17</sup>

### **3. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.<sup>18</sup> Dalam membahas mengenai kepentingan bantuan ekonomi Jepang untuk Indonesia, penulis menggunakan konsep kepentingan

---

<sup>17</sup> *ibid.*

<sup>18</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 109

nasional (National Interest ). Pada dasarnya, tujuan nasional yang hendak di capai oleh suatu pemerintahan didasarkan pada kepentingan – kepentingan Negaranya, yang disebut kepentingan nasional. Negara menetapkan kepentingan-kepentingan nasionalnya dan juga menentukan cara bagaimana kepentingan tersebut dicapai. Metode dan tindakan yang digunakan untuk mencoba mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional.

Untuk membantu menjelaskan kepentingan suatu negara, dalam hal ini yaitu kepentingan Jepang dalam membantu membangun kembali Aceh pasca gempa bumi dan gelombang tsunami. konsep kepentingan nasional ini sering dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik Internasional, bahkan sering kali dipakai sebagai ukuran keberhasilan.<sup>19</sup> Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Semua bangsa melakukan hubungan dengan negara lain dan harus memisahkan politik luar negerinya dengan politik dalam negerinya. Politik luar negeri digunakan sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.<sup>20</sup>

Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional tersebut.

Berkaitan dengan kepentingan nasional ini, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa :

---

<sup>19</sup> Ibid, Mohtar Mas' oed, hal 135

<sup>20</sup> SL Roy, *Diplomasi*, terjemahan Harwanto dan Mirsawati, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 31

*“National interest is the fundamental and ultimate determinan that guides the decision makers of a state in making foreign policy the national interest of a state is typical a highly generalized conception of those elements that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial, military security and economic well being”.*<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi interen bagi kepentingan nasionalnya. Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda, tapi pada umumnya berkisar pada beberapa hal, misalnya perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Melihat konsep kepentingan nasional seperti yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, maka perlu dikaji satu persatu elemen-elemen kepentingan nasional ini.

Elemen yang pertama adalah perlindungan diri sendiri. Jepang tidak perlu takut terhadap Indonesia karena Indonesia bukanlah suatu ancaman yang besar bagi Jepang. Dalam berbagai hal Indonesia tertinggal jauh dari Jepang dan Jepang jauh lebih unggul dalam segala bidang. Bahkan hubungan Indonesia dengan Jepang berjalan baik dalam hal ekonomi maupun politik.

Elemen kedua adalah kebebasan, Jepang merupakan negara yang beruntung. Jepang bukanlah negara jajahan manapun. Ini disebabkan karena

---

<sup>21</sup> Jack C.Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Rinehart and Winstone, 1969, hal 128

negara ini tidak banyak memiliki sumber daya dan tidak menarik sebagai pasaran produk sehingga tidak menarik negara lain untuk menguasainya.<sup>22</sup>

Elemen ketiga adalah kesatuan wilayah. Hubungan antara Indonesia dengan Jepang tidak diwarnai dengan adanya pertikaian dalam hal persengketaan wilayah ataupun kawasan tertentu.

Elemen keempat adalah keamanan militer. Sesuai dengan Fransisco Peace Treaty, Jepang dalam bidang militer dan pertahanan menyerahkan sepenuhnya kepada Amerika, sehingga dalam berhubungan dengan Indonesia masalah ini tidaklah merupakan masalah yang penting.

Elemen kelima adalah ekonomi. Elemen yang terakhir inilah kemungkinan merupakan kepentingan Jepang terhadap Indonesia.

Kepentingan nasional melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional, dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual dan terencana yang ditujukan oleh suatu negara. Jika dilihat dari beberapa tujuan luar negeri suatu negara seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional Jepang dalam hal pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia lebih ditekankan pada kesejahteraan ekonominya. Hal ini juga dapat dilihat dari hubungan kerjasama Indonesia-Jepang baik dibidang perdagangan maupun investasi yang telah berlangsung sejak lama.

---

<sup>22</sup> Yoshihara Kunio, *Perkembangan Ekonomi Jepang Sebuah Pengantar*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24

## **F. HIPOTESA**

Jepang melibatkan KPK dalam melakukan pengawasan terhadap dana bantuan ODA kepada Aceh karena dana bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Aceh berasal dari masyarakat yang membayar pajak (*tax payer*), karena hal tersebut Pemerintah Jepang harus mempertahankan legitimasi instrumental yang diberikan oleh rakyat Jepang dan adanya indikasi penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan sehingga KPK ikut terlibat mengawasi penggunaan dana bantuan, serta karena keberlangsungan kepentingan ekonomi Jepang.

## **G. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deduksi yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan melalui cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>23</sup> Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan (*Library Research*). Sumber data sekunder yang digunakan meliputi, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet, makalah-makalah ilmiah yang sesuai dengan topik permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Pustaka Pelajar : Yogyakarta 1999), hal 5-6

## **H. JANGKAUAN PENULISAN**

Penulisan skripsi ini di fokuskan pada tahun 2004 – 2005 dimana pada tahun tersebut Indonesia mengalami bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh. Tetapi untuk memberikan latar belakang yang komprehensif dalam pembahasannya, maka tidak menutup kemungkinan penulis menjelaskan masalah diluar batasan itu untuk memperkuat data pendukung penulisan agar lebih relevan.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan pada masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci kedalam sub-sub bab. Pembahasan pada satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lainnya, sehingga pada akhirnya akan membentuk sebuah karya tulis yang sistematis.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **Bab. I Pendahuluan**

Merupakan pertanggungjawaban metodologi penulisan ini yang meliputi, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, metodologi penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

### **Bab. II Pembahasan mengenai sejarah *ODA (Official Development Assistanc )***

Dalam bab ini dibahas mengenai sejarah ODA mulai dari awal berdiri sampai sekarang dan pembahasan mengenai penyaluran bantuan serta karakteristik ODA.

### Bab. III Pembahasan mengenai bentuk bantuan yang diberikan Jepang

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bantuan apa saja yang diberikan Jepang kepada Indonesia pasca gempa bumi dan tsunami Aceh, baik dalam bentuk barang atau hibah.

Bab IV Pembahasan alasan pengawasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bantuan yang diberikan.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pemerintah Jepang terhadap publik, indikasi adanya penyalahgunaan dana bantuan ODA serta keberlangsungan kepentingan ekonomi Jepang.

### Bab V. Kesimpulan

Bab terakhir ini merupakan inti sari dari pembahasan bab-bab sebelumnya.